



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kualitas rumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja masih belum sepenuhnya berorientasi hasil, khususnya pada level perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan program dan kebijakan yang dilaksanakan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

2. Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17
 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BATANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi					Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen area perubahan : 1.Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3.Penataan dan Penguatan Organisasi; 4.Penataan Tata laksana; 5. Penataan sistem manajemen SDM; 6. Penguatan akuntabilitas; 7. Penguatan pengawasan; 8.	SETDA & SEMUA OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
					Penguatan kualitas pelayanan publik	
		2 OPD yang mendapat opini WBK			Jumlah OPD yang mendapat predikat WBK dari Kemenpan RB	SETDA, INSPEKTORAT DAERAH & SEMUA OPD
			1 Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	1 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks yang didapat dari kompilasi nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan	SETDA & SEMUA OPD
			2 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan nilai/skor masing-masing jawaban dimensi/indikator	BKD & SEMUA OPD
				2 Nilai SAKIP	Nilai yang didapat dari KemenPAN-RB (30% perencanaan kinerja+25% pengukuran kinerja +15% pelaporan kinerja +10% evaluasi	SETDA, DISKOMINFO, & BAPELITBANG

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
								internal+ 20% capaian kinerja)		
							3	Opini BPK	Predikat dari BPK RI atas laporan keuangan	INSPEKTORAT & BPKPAD SETDA & SEMUA OPD
							4	Nilai LPPD	Nilai yang didapat dari Kemendagri	SETDA & SEMUA OPD
							5	Skor PeGi (Pemeringkatan E-Goverment	Skor dari Kemen Kominfo (Skor dari penilaian 5 dimensi penilaian PeGi yaitu : kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan)	DISKOMINFO
							6	Smart City/Smart Village	Evaluasi Smart City dari Kementrian Komunikasi dan Informatika RI	DISKOMINFO
2	Meningkatkan kualitas manusia Batang seutuhnya	1	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)						Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran	DINKES, DISDIKBUD
				1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang			Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani	DINKES

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
					paripurna secara holistik			seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu	
				2	Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang		Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah rata-rata nilai ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs	DISDIKBUD
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	1	IDM (Indeks Desa Membangun)					$IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$ IS : Indeks Sosial IE : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan	DISPERMADES
				1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$ IPM : Indeks Pembangunan Manusia	DP3AP2KB
						2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Proporsi keterwakilan wanita dalam bidang ekonomi dan politik	DP3AP2KB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab		
				3	Kecamatan ramah anak	Jumlah kecamatan yang sudah memenuhi kriteria kecamatan ramah anak di bagi jumlah kecamatan yang ada dikalikan 100%	DP3AP2KB & DISPERMADES	
			2	Terwujudnya pengendalian penduduk dan meningkatnya validitas database kependudukan	1	Pertumbuhan penduduk per tahun	$Pt = (L - M) + (I - E)$ Pt : Pertumbuhan penduduk L : Angka kelahiran dalam satu tahun M : Angka Kematian dalam satu tahun I : Penduduk yang masuk (Imigran) E : Penduduk yang keluar (Emigran)	DP3AP2KB
				2	Menurunnya persentase data ganda dan anomali	Jumlah data ganda dan anomali dibagi jumlah data yang ada dikali 100%	DISDUKCAPIL	
			3	Meningkatnya kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta		Persentase lapangan usaha yang diciptakan oleh pemuda	Jumlah pemuda berwirausaha dibagi jumlah pemuda dikalikan 100 %	DISPARPORA

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
					pengembangan industri kreatif				
			4	Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing Koperasi serta UMKM	1	Kontribusi jasa keuangan terhadap lapangan usaha "Jasa Keuangan dan asuransi" pada PDRB ADHB	Jumlah sektor jasa keuangan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
					2	Pertumbuhan produktifitas UMKM	Jumlah UMKM tahun N dikurangi jumlah UMKM tahun N-1 dibagi jumlah UMKM sampai dengan tahun N dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	1	Pertumbuhan Ekonomi				$R = \frac{PDBrt - PDBrt-1}{PDBrt-1} \times 100\%$ <p>R : Laju Pertumbuhan Ekonomi PDBrt : Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu PDBrt-1 : Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya</p>	DISPERINDAGKOP DAN UKM	

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
		2	Pengeluaran Per Kapita					$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$ <p>Y* : Pengeluaran per kapita harga konstan Y : Pengeluaran per kapita setahun IHK : Indeks Harga Konsumen</p>	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
				1	Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang		1	Jumlah realisasi nilai investasi	Jumlah investasi baik dari dalam maupun luar negeri yang masuk ke Kabupaten Batang tahun N	DPMPSTP
							2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan 100%	DISNAKER
							3	Pertumbuhan Industri	Jumlah industri tahun N dikurangi jumlah industri tahun N-1 dibagi jumlah industri sampai dengan tahun N dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
				4	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	Jumlah sektor industri pengolahan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		2	Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi sektor pertanian dibagi jumlah PDRB ADHB sektor pertanian dikalikan 100%	DISPAPERTA
				2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	Hasil kali persen konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan skor maksimal kelompok pangan	DISPAPERTA
				3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		3	Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISPARPORA

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
				4	Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari		Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perikanan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISLUTKANAK
				5	Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial		Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin di Kab.Batang dibagi jumlah penduduk Kab. Batang dikali 100%	DINSOS; DPRKP; DISNAKER
5	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)					$\text{IKLH Kabupaten} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ <p>IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IPA : Indeks Kualitas Air IPU : Indeks Kualitas Udara ITH : Indeks Tutupan Hutan</p>	DLH
		2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur					$\text{Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur} = 0,4122 * \text{jalan} + 0,4149 * \text{air} + 0,4620 * \text{sanitasi} +$	DPUPR, DPRKP, DISKOMINFO

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
					0,4368*pkpl + 0,5037*telp-internet	
		1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase zona/wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi	Besar total angka keterkaitan adalah jumlah angka terbesar dari masing-masing simpul Besar rata-rata angka keterkaitan adalah jumlah total angka keterkaitan dibagi jumlah simpul	DISHUB; DPUPR; DPRK
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi	1 Indeks standar pencemaran udara	$I = \frac{Ia - Ib}{(Xx - Xb) + Ib} \times Xa - Xb$ I : ISPU Ia : ISPU batas atas Ib : ISPU batas bawah Xa : konsentrasi ambien batas atas Xb : konsentrasi ambien batas bawah Xx : konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran	DLH
				2 Rasio Ruang Terbuka Hijau	$L = \frac{(X+Z)}{(54)(0,9375)} \times m^2$ L : LuasRTH yang dibutuhkan	DLH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
					<p>X : Kebutuhan oksigen manusia Z : Kebutuhan oksigen kendaraan bermotor 54 : Konstanta yang menyarankan bahwa setiap 1m² tanaman per hari dapat menghasilkan 54 gr bahan kering 0,9375 : Nilai konstanta yang menunjukkan bahwa 1 gr bahan kering dapat menghasilkan oksigen sebanyak 0,9375</p>	
				3	<p>Persentase Penurunan luasan rob dan abrasi</p>	DLH
				4	<p>Persentase ketersediaan air yang memenuhi kualitas standar air baku</p>	DLH

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
6	Membangkitkan sistem keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya	1	Indeks rasa aman					Hasil survei/kuesioner kepada masyarakat	SATPOL PP & KESBANGPOL	
		2	Persentase konflik sosial dan budaya					Jumlah konflik sosial dan budaya dibagi jumlah kasus dikali 100%	SATPOL PP & KESBANGPOL	
				1	Terciptanya keamanan lingkungan dan <i>early warning system</i> penanggulangan bencana	1	Persentase penurunan angka kriminalitas		Jumlah kasus kriminalitas dibagi jumlah penduduk dikali 100%	SATPOL PP & KESBANGPOL
						2	Penurunan kerugian bencana		Jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tahun N	BPBD
				2	Meningkatnya integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat		Persentase penurunan konflik SARA		Jumlah kasus SARA yang terjadi dibagi jumlah kasus dikali 100%	KESBANGPOL

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17
 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BATANG.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Sekretariat Daerah					
1.		Meningkatnya tatalaksana pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	IKM Setda	Kompilasi nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada 9 bagian di Setda Kabupaten Batang	Bagian Organisasi	Setda
2.		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100 persen	Bagian Organisasi	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3		4	5	6	7
Sekretariat DPRD							
1		Terwujudnya SDM aparatur yang profesional		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan / workshop	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ workshop	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
2		Terwujudnya SDM legislative yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya	1	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan bintek/ workshop	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan bintek/ workshop	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD
3		Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan siding DPRD serta penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	1	Jumlah rapat yang difasilitasi	Jumlah rapat yang difasilitasi	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah							
1.		Meningkatnya pengawasan berbasis resiko guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih	1	Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	Jumlah temuan tahun berjalan dibagi jumlah pada tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
			2	Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial)	Jumlah temuan kerugian negara/ pemborosan (bersifat finansial) tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
			3	Penanganan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah aduan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
2.		Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan	1	Presentase sarana prasarana kondisi baik	Kondisi ketersediaan sarana prasarana tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			2	Hasil survey kepuasan	Indek/Nilai Hasil Survej	Sekretariat	Inspektorat Daerah
3.		Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan Perangkat Daerah		Opini Laporan Keuangan Pemda	Perbandingan opini BPK tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
4.		Meningkatnya kualitas LKjIP Pemda dan Perangkat Daerah	1	Meningkatnya nilai hasil evaluasi LKjIP Inspektorat Daerah	Jumlah PD yang memiliki nilai evaluasi sangat baik	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
			2	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu LKjIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	Rasio perolehan nilai evaluasi LKjIP PD tahun berjalan dan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
5.		Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan		Persentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	Jumlah temuan tahun berjalan yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
6.		Meningkatnya jumlah obrik		Persentase peningkatan obrik	Jumlah obrik tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya	Sekretariat	Inspektorat Daerah
7.		Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1	Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat	Jumlah SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			2	Jumlah SDM bersertifikat auditor	Jumlah SDM bersertifikat auditor tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
8		Meningkatnya kinerja pengawas	1.	Level KPA	Nilai/Indek Level KPA	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
			2.	Level maturitas SPIP	Nilai/Indek Level KPA		
Disdikbud							
1.		Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	BPS	Disdikbud
			2	Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	BPS	Disdikbud
			3	Angka partisipasi kasar Pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta didik PAUD dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100%	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud
			4	Prosentase satuan Pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah seluruh satuan PAUD x dikali 100%	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud
			5	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah	Jumlah TK Negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai Gedung yang	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
			mempunyai Gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebeleur dalam kondisi yang baik	dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebeleur dalam kondisi yang baik dibagi Jumlah Seluruh TK Negeri dikali 100%		
			6 Persentase jumlah satuan Pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program Pendidikan karakter secara berkelanjutan	Jumlah satuan Pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program Pendidikan karakter secara berkelanjutan dibagi Jumlah seluruh satuan PAUD dikali 100%	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud
			7 Angka partisipasi kasar SD/ sederajat	Jumlah peserta didik dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	Bidang SD	Disdikbud
			8 Angka partisipasi murni SD/ sederajat	Jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	Bidang SD	Disdikbud
			9 Rata-rata nilai ujian SD/ sederajat	Rata-Rata Hasil Ujian SD	Bidang SD	Disdikbud
			10 Angka partisipasi kasar SMP/ sederajat	Jumlah peserta didik dibagi jumlah penduduk	Bidang SMP	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				usia 13-15 tahun dikali 100%		
			11 Angka partisipasi murni SMP/ sederajat	Jumlah peserta didik SMP usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			12 Rata-rata nilai ujian SMP/ sederajat	Rata-Rata Hasil Ujian SMP	Bidang SMP	Disdikbud
			13 Angka melanjutkan dari SD ke SMP	Jumlah Siswa Baru yang diterima di SMP/Sederajat dibagi Jumlah Siswa Lulusan SD/Sederajat dikali 100%	Bidang SD	Disdikbud
			14 Persentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik	Jumlah SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik dibagi Jumlah Seluruh SD Negeri dikali 100%	Bidang SD	Disdikbud
			15 Persentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal	Jumlah SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal	Bidang SMP	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
				(ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik	(ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik dibagi Jumlah Seluruh SMP Negeri dikali 100%		
			16	Persentase sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	Jumlah satuan PAUD, SD dan SMP yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan dibagi jumlah seluruh satuan PAUD, SD dan SMP dikali 100%	Bidang PAUD dan PNF, Bidang SD dan Bidang SMP	Disdikbud
			17	Angka putus sekolah SD	Jumlah siswa putus sekolah SD dibagi jumlah seluruh siswa SD pada tahun tertentu dikali 100%	Bidang SD	Disdikbud
			18	Angka putus sekolah SMP	Jumlah siswa putus sekolah SMP dibagi jumlah seluruh siswa SMP pada tahun tertentu dikali 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			19	Angka lulusan SD	Jumlah siswa lulus SD dibagi jumlah siswa	Bidang SD	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
					tingkat terakhir SD dikali 100%		
			20	Angka lulusan SMP	Jumlah siswa lulus SMP dibagi jumlah siswa tingkat terakhir SMP dikali 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			21	Angka melek huruf penduduk usia produktif	Jumlah penduduk usia 18-60 tahun yang melek aksara dibagi jumlah penduduk usia 18-60 dikali 100%	Bidang PAUD dan PNF,	Disdikbud
			22	Persentase program atau satuan Pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	Jumlah program atau satuan Pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah seluruh program atau satuan PNF dikali 100%	Bidang PAUD dan PNF,	Disdikbud
2.		Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsive dan partisipatif	1	Persentase guru berkualifikasi ijazah S1/D4	Jumlah guru berkualifikasi minimal S1/D4 dibagi jumlah seluruh guru dikali 100%	Bidang Ketenagaan	Disdikbud
			2	Persentase guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	Jumlah guru yang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dibagi jumlah guru dikali 100%	Bidang Ketenagaan	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
			3	Rata-rata hasil uji kompetensi guru	Nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru yang diselenggarakan Kemendikbud	Bidang Ketenagaan	Disdikbud
3.		Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan Bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan local	1	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
			2	Jumlah grup kesenian yang dibina	Jumlah grup kesenian yang dibina	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
			3	Jumlah benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
4.		Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan Pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pendidikan dan kebudayaan	Nilai hasil survey kepuasan	Sekretariat	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Satpol PP					
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat	Satpol PP
2.		Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat	Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Bidang Penegakan Perda, Bidang Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
3		Meningkatnya penanggulangan bencana kebakaran	Persentase penurunan kerugian akibat bencana kebakaran	Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran dikali 100	Bidang Pemadam Kebakaran	Satpol PP

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	DP3AP2KB						
1.		Terakomodasi kepentingan perempuan dan anak	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Nilai SAKIP DP3AP2KB hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	DP3AP2KB
			2	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah pekerja perempuan	Disnaker BPS	DP3AP2KB
			3	Partisipasi perempuan di Lembaga swasta	Pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan	Disnaker BPS	DP3AP2KB
			4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Pekerja anak usia 5-14 tahun dibagi Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	Disnaker BPS	DP3AP2KB
			5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja perempuan	BPS	DP3AP2KB

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
			6	Kecamatan ramah anak	Jumlah Kecamatan yang sudah ramah anak dibagi jumlah Kecamatan	Bidang PPPA	DP3AP2KB
			7	Persentase perempuan di Lembaga legislative	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dibagi Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Setwan	DP3AP2KB
2.		Peserta KB aktif dan peserta KB baru	1	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	Jumlah peseta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
			2	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Jumlah anak dibagi jumlah keluarga	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
3.		Menurunnya PUS yang ber-KB tidak terlayani		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (Unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber -KB tidak terlayani dibagi jumlah PUS	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
4.		Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKB		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Jumlah anggota BKB yang ber -KB dibagi jumlah anggota BKB	Bidang Dalduk	DP3AP2KB

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
5.		Semakin bertambah anggota kelompok UPPKS menjadi peserta KB		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber - KB dibagi jumlah PUS anggota UPPKS	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
Dinas Pangan dan Pertanian							
1.		Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian		Persentase peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi produk pertanian tahun N dibandingkan dengan tahun N-1 dikalikan 100%	Bidang Ketahanan Pangan	Dispaperta
2		Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama	1	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)		Bidang Ketahanan Pangan	Dispaperta
				a. beras	Produksi gabah kering panen dikurangi angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendeman beras 62,74%		
				b. jagung	Produksi jagung dikurangi angka susut atau dikalikan dengan angka konversi jagung 89%		

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
			2	Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Jumlah cadangan pangan kabupaten di bagi standar cadangan pangan kabupaten dikali 100%	Bidang Ketahanan Pangan	Dispaperta
3.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dispaperta		Nilai SAKIP Dispaperta	Nilai SAKIP Dispaperta	Sekretariat	Dispaperta
Dinas Lingkungan Hidup							
1.		Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Jumlah pelaku usaha/perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	Jumlah pelaku usaha / perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2.		Terwujudnya air sungai yang bersih tidak tercemar		Jumlah sungai	Jumlah pengambilan uji sampel air dibagi jumlah sungai	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
3.		Peningkatan Ruang Terbuka Hijau		Rasio Ruang Terbuka Hijau	Jumlah kawasan lindung dibagi jumlah ruang terbuka hijau	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4.		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan		Persentase penanganan sampah	Jumlah penduduk per 1.000 dibagi jumlah bank sampah dikalikan 100%	Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
Disparpora							
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Disparpora		Nilai SAKIP Disparpora	Nilai SAKIP Disparpora hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disparpora
2.		Meningkatnya jumlah pengunjung destinasi wisata		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun N – jumlah wisatawan tahun N-1 dibagi jumlah wisatawan tahun N-1 dikali 100%	Bidang Pemasaran Pariwisata	Disparpora

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
3.		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N dikurangi jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N-1 dibagi jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N-1 kali 100%	Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata	Disparpora
4.		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga		Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	Disparpora
DPMPTSP							
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPMPTSP		Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	<i>DPMPTSP</i>
2.		Meningkatnya jumlah investasi PMA, PMDN, dan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Jumlah investasi tahun N – jumlah tahun N-1 di Kab.Batang dibagi jumlah investasi tahun N-1 di Kab.Batang dikali 100%	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	Disnaker						
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Ketenagakerjaan		Nilai SAKIP Disnaker	Nilai SAKIP DPMPSTP hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disnaker
2		Meluasnya kesempatan kerja bagi masyarakat	1	Tingkat kesempatan kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	Bidang Lapentatrans	Disnaker
			2	Persentase pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan dibagi jumlah pencari kerja dikali 100%		
3		Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja		Rasio ketergantungan	Jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dibagi dengan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) dikalikan 100%	Bidang Lapentatrans	Disnaker
4		Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	Bidang Hubungan Industrial	Disnaker

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
5		Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan meningkatnya kemandirian transmigran		Persentase penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yang berhasil ditempatkan setelah mendapat pelatihan dibagi jumlah transmigran dikali 100%	Bidang Lapentatrans	Disnaker
Dinas Kesehatan							
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinkes		Nilai SAKIP Dinkes	Nilai SAKIP Dinkes	Sekretariat	Dinas Kesehatan
2.		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan status gizi masyarakat	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin, nifas dalam satu tahun dibagi jumlah kelahian hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan
			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian anak usia kurang dari 1 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan
			3	Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA)	Jumlah kematian anak usia kurang dari 5 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			4	Angka Kesembuhan Pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA) Positif (<i>Cure Rate/CR</i>)	Jumlah Penderita TB BTA yang sembuh dibagi jumlah penderita TB BTA ditambah yang diobati dibagi 100	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
			5	Angka Prevelensi Penyakit Kusta	Jumlah Kasus Baru Kusta yang ditemukan dibagi Jumlah Penduduk Pada Tahun yang sama dikali 100.000		
			6	Angka Kesakitan Malaria (<i>Annual Parasite Incidence/API</i>)	Jumlah penderita malaria positif yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama kali 1.000		
			7	Angka Kesakitan Demam Berdarah <i>Dengue</i> (<i>Incidence Rate/IR DBD</i>)	Jumlah Kasus Demam Berdarah <i>Dengue</i> yang Ditemukan Dibagi Jumlah Penduduk Pada Tahun yang Sama Kali 100.000		
			8	Angka Prevelensi Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus Gizi Buruk yang Ditemukan (Berat Badan/Tinggi Badan) dibagi Jumlah Balita yang Ada Kali 100)		

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
			9	Angka Prevelensi Stunting	Jumlah Kasus Balita Stunting Dibagi Jumlah Balita Yang Ada Kali 100		
DPUPR							
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPUPR		Nilai SAKIP DPUPR	Nilai SAKIP DPUPR hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	DPU PR
2.		Meningkatnya konektivitas jalan dan jembatan di daerah		Cakupan konektivitas wilayah	Panjang jalan daerah (Kabupaten) yang mendukung kawasan prioritas yang dibangun/direhab dibagi total Panjang jalan daerah yang mendukung Kawasan prioritas dikali 100%	Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan	DPU PR
3.		Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air irigasi		Persentase luas sawah yang beririgasi	Luas sawah yang dialiri irigasi dibagi luas areal sawah kabupaten dikalikan 100%	Bidang Pengairan	DPU PR
4.		Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	Jumlah Gedung negara dibagi jumlah kebutuhan bangunan Gedung negara dikali 100%	Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan	DPUPR

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
5.		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata ruang yang berwawasan lingkungan	1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah per HPL/HGB kali 100%	Bidang Penataan Ruang	DPUPR
			2.	Luas RTH Publik 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibagi luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan kali 100%		DPUPR
DPRKP							
1		Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas DPRKP		Nilai SAKIP DPRKP	Nilai SAKIP DPRKP hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	DPRKP
2		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan pemukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan	1.	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman yang layak	Jumlah infrastruktur yang dipenuhi dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	Bidang Pemukiman	DPRKP
			2.	Persentase pengurangan pemukiman kumuh	Jumlah luas lingkungan kumuh yang tertangani dibagi luas lingkungan kumuh kali 100%	Bidang Pemukiman	DPRKP

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3		Meningkatnya penyelesaian permasalahan pertanahan	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%	Bidang Perumahan dan Pertanahan	DPRKP
Disdukcapil						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Disdukcapil	Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai SAKIP Disdukcapil hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disdukcapil
2.		Meningkatnya penduduk yang memiliki data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap	Persentase kepemilikan identitas penduduk dan akte kelahiran	Jumlah KIA ditambah jumlah penduduk berKTPelektronik dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun kali 100%	Bidang Capil	Disdukcapil
3.		Meningkatnya kualitas database dan informasi kependudukan yang valid dan update	Persentase data kependudukan yang valid	Jumlah data kependudukan yang terverifikasi valid dikurangi jumlah seluruh data kependudukan kali 100%	Bidang PIAK	Disdukcapil

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	Diskominfo						
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Diskominfo		Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat	Diskominfo
2.		Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berbasis Smart City	1	Indeks SPBE	Perhitungan Indeks SPBE dilakukan oleh Kemenpan RB setiap satu tahun sekali melalui evaluasi sesuai dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2018 tentang SPBE	Kementrian Kominfo	Diskominfo
			2	Indeks Smart City	Perhitungan Indeks Smart City dilakukan oleh Kementerian Kominfo setiap satu tahun sekali melalui evaluasi	Kementrian Kominfo	Diskominfo

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3		Meningkatnya pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik	Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik	Perhitungan tingkat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik dilakukan oleh komisi informasi Provinsi Jateng setiap satu tahun sekali melalui evaluasi	Hasil Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Diskominfo
4		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dan penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan dan statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengguna data statistik sektoral dibagi jumlah Perangkat Daerah sebagai produsen data kali 100%	Sistem informasi statistic sektoral dan Perangkat Daerah Produsen Data	Diskominfo
5		Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik	Indeks Keamanan Informasi	Perhitungan indeks keamanan informasi dapat dilakukan oleh BSSH atau melalui evaluasi internal sesuai dengan indeks keamanan informasi setiap satu tahun sekali	Laporan/ Audit Internal	Diskominfo

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	Dislutkanak						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dislutkanak		Nilai SAKIP Dislutkanak	Nilai SAKIP Dislutkanak hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Dislutkanak
2.		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap dalam satu tahun	Bidang Usaha dan Pengelolaan TPI	Dislutkanak
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	2	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya satu tahun	Bidang Perikanan Budidaya	Dislutkanak
		Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Batang	3	Tingkat konsumsi makan ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi/setara konsumsi ikan utuh segar	Bidang Usaha dan Pengelolaan TPI	Dislutkanak

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
3.		Meningkatnya populasi hewan ternak		Jumlah populasi hewan ternak	Jumlah populasi hewan ternak dalam satu tahun	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dislutkanak
4.		Meningkatnya produksi ternak		Jumlah produksi ternak (produksi daging, telur dan susu)	Jumlah produksi daging (Kg), telur (Kg) dan Susu (Kg)	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dislutkanak
Dinas Sosial							
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Sosial		Nilai SAKIP Dinsos	Nilai SAKIP Dinsos dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Dinas Sosial
2.		Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga dibagi Jumlah PMKS X 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			2	Persentase PMKS yang menerima manfaat program penanganan bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PMKS penerima program penanganan bencana dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima program	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
				penanganan bencana kali 100			
			3	Persentase warga negara migran yang dipulangkan yang menerima fasilitas kepulangannya	Jumlah warga negara migran penerima program penanganan dibagi jumlah warga negara migran yang seharusnya menerima program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan kali 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			4	Persentase PMKS penerima manfaat program rehabilitasi sosial	Jumlah PMKS yang menerima program rehabilitasi social dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima program rehabilitasi sosial kali 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			5	Persentase PMKS penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah PMKS penerima program perlindungan dan jaminan social dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima program perlindungan dan jaminan sosial kali 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
3.		Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PSKS yang aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos dibagi Jumlah PSKS dikali 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
			2	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah PSKS yang aktif kali 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
			3	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara dibagi jumlah taman makam pahlawan kali 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
	Bapelitbang						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perencanaan dan Litbang Daerah		Nilai SAKIP Bapelitbang	Nilai SAKIP Bapelitbang hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Bapelitbang

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
2.		Terwujudnya perencanaan yang holistik, tematik dan terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah	1.	Persentase sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Jumlah sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD kali 100	Bidang PPEPD	Bapelitbang
			2.	Nilai penghargaan pembangunan daerah	Hasil penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang pada tahun berkenaan	Bidang PPEPD	Bapelitbang
3		Meningkatnya efektivitas pembangunan daerah berbasis hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Hasil kelitbangan yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang telah dilaksanakan dikali 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang
			2.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	BPKPAD						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas BPKPAD		Nilai SAKIP BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	BPKPAD
2.		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkualitas	1	Terlaksananya penerapan administrasi keuangan berbasis IT	Jumlah OPD yang menerapkan administrasi berbasis IT / Jumlah seluruh OPD di Kabupaten Batang dikali 100	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	BPKPAD
			2	Tersusunnya Perda APBD, Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran	Jumlah Perda APBD, Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran yang tersusun Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan	BPKPAD
			3	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	Jumlah Perda APBD, Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran yang tersusun Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan	BPKPAD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
3.		Meningkatnya jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase penyelesaian masalah Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Jumlah masalah PBB terselesaikan/Jumlah seluruh masalah PBB dikali 100	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP	BPKPAD
			2	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi yang ada	PAD tahun N dikurangi PAD tahun N-1 dibagi PAD tahun N-1 dikalikan 100%	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP	BPKPAD
4.		Tersusunnya Data Aset Pemerintah Daerah yang Valid		Terdokumentasinya Aset Pemerintah Daerah Batang Menurut Persebaran, Sttus dan Kepemilikan Serta Kondisinya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilaporkan	Bidang Aset Daerah	BPKPAD
BKD							
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas BKD		Nilai SAKIP BKD	Nilai SAKIP BKD hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	BKD
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan adminstrasi kepegawaian		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai rata-rata survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Sekretariat	BKD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3		Terwujudnya ASN yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase ASN dengan nilai kerja kriteria "baik" dan "sangat baik"	Jumlah ASN Kabupaten Batang yang memiliki kinerja "baik" dan "sangat baik" dibagi jumlah ASN Kabupaten Batang kali 100	Bidang Binkes	BKD
Kesbangpol						
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbang	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Badan Kesbangpol
2		Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib	Persentase demo tertangani	Jumlah demo tahun berkenaan dibagi jumlah demo tahun sebelumnya dikali 100	Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Bidang Poldagri dan Ormas	Badan Kesbangpol

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3		Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	Persentase potensi gangguan/ konflik sosial keagamaan yang teratasi	Jumlah konflik social tahun berkenaan dibagi jumlah konflik sosial tahun sebelumnya dikali 100	Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sosial	Badan Kesbangpol
	BPBD					
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Nilai SAKIP BPBD hasil evaluasi Inspektorat	Sekretariat	BPBD
2		Tertanganinya Daerah Rawan Bencana secara efektif dan efisien	Persentase penurunan daerah rawan bencana	Jumlah desa dan kelurahan rawan bencana di bagi jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Batang dikali 100%		BPBD
3		Meningkatnya fasilitasi kegiatan kajian resiko bencana di Kabupaten Batang	Persentase ketersediaan peta resiko bencana	Jumlah peta resiko bencana dibagi peta resiko di Kabupaten Batang dikali 100%		BPBD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
Dispermades							
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dispermades		Nilai SAKIP Dispermades	Nilai SAKIP Dispermades hasil evaluasi Inspektorat	Sekretariat	Dispermades
2		Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan sosial ekonomi dan ekologi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Sosial	Hasil penilaian dari variabel pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman	Bidang Pemberdayaan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dispermades
			2	Indeks Ketahanan Ekonomi	Hasil penilaian dari variabel keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar akses logistik, akses perbankan dan kredit keterbukaan wilayah		Dispermades
			3	Indeks Ketahanan Ekologi	Hasil penilaian dari variable kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana		Dispermades
3		Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat		Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Jumlah sumbangan pendapatan dari perempuan dibagi jumlah pendapatan dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dispermades

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
Disperindagkop dan UKM						
1		Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Disperindagkop dan UKM	Nilai SAKIP Disperindagkop dan UKM	Nilai SAKIP Disperindagkop dan UKM hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disperindagkop dan UKM
2		Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas koperasi di Kabupaten Batang	Pertumbuhan Koperasi Sehat	(Jumlah koperasi sehat tahun n – jumlah koperasi sehat tahun n-1) dibagi jumlah koperasi sehat tahun n-1) kali 100	Bidang Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
3		Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah produk UMKM yang mampu berdaya saing di pasar domestik maupun manca negara	Jumlah produk UMKM yang mampu berdaya saing di pasar domestik maupun manca negara	Bidang Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
4		Meningkatkan pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	(Jumlah IKM tahun n – jumlah IKM tahun n-1) dibagi jumlah IKM tahun n-1 kali 100	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Disperindagkop dan UKM

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
5		Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan peredaran barang/jasa dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor - nilai impor	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Disperindagkop dan UKM
Dishub						
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dishub	Nilai SAKIP Dishub	Nilai SAKIP Dishub hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat	Dishub
2		Meningkatnya layanan mobilitas dan kapasitas sarana prasarana transportasi	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	Bidang Angkutan	Dishub
3		Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	Persentase penurunan angka kecelakaan	Jumlah kecelakaan tahun sekarang dikurangi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dibagi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dikalikan 100%	Bidang KTS	Dishub

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
Disperpuska							
1		Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Disperpuska hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disperpuska
			2	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tingkat kematangan organisasi Disperpuska	Sekretariat	Disperpuska
			3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKM Disperpuska hasil survey SKM pada Disperpuska	Sekretariat	Disperpuska
2		Meningkatnya minat membaca dan pembangunan literasi masyarakat	1	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	$TGM = (0,3 \times (FM + DM + JB)) + 0,05 \times (FAI + DAI)$ <p>TGM = tingkat gemar membaca masyarakat FM = frekuensi membaca DM = durasi membaca JB = jumlah bacaan FAI = frekuensi akses internet</p>	Bidang Perpustakaan	Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
					DAI = durasi akses internet		
			2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$IPLM = \sum \frac{UPLM}{AM}$ <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p>	Bidang Perpustakaan	Disperpuska
3		Terpeliharanya dokumen arsip daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1	Tingkat ketersediaan arsip	$= \frac{a + i + s + j}{4}$ <p>T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah</p>	Bidang Kearsipan	Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				<p>dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p>j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>		
			2	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip</p> $T = \frac{m + b + g + a + c + i}{6}$ <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran</p>	Bidang Kearsipan	Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
	Kecamatan					
1.		Meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan	Sekretariat	Kecamatan

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
2.		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat	Kecamatan
3.		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam wilayah kecamatan	Data Rumah Tangga Miskin (RTM) per kecamatan dari Dinas Sosial	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan
4.		Terwujudnya kondusivitas wilayah kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	Jumlah kasus kriminal dibagi jumlah penduduk kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan

BUPATI BATANG,

ttd

WHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17
 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BATANG

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
Sekretariat Daerah						
1.		Meningkatnya tatalaksana pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	IKM Setda	Kompilasi nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada 9 bagian di Setda Kabupaten Batang	Bagian Organisasi	Setda
2.		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100 persen	Bagian Organisasi	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
Sekretariat DPRD							
1		Terwujudnya SDM aparatur yang profesional		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan / workshop	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ workshop	Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
2		Terwujudnya SDM legislative yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya	1	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan bintek/ workshop	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan bintek/ workshop	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD
3		Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan siding DPRD serta penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	1	Jumlah rapat yang difasilitasi	Jumlah rapat yang difasilitasi	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah							
1.		Meningkatnya pengawasan berbasis resiko guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih	1	Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	Jumlah temuan tahun berjalan dibagi jumlah pada tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
			2	Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial)	Jumlah temuan kerugian negara/ pemborosan (bersifat finansial) tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
			3	Penanganan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah aduan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
2.		Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan	1	Presentase sarana prasarana kondisi baik	Kondisi ketersediaan sarana prasarana tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			2	Hasil survey kepuasan	Indek/Nilai Hasil Survey	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
3.		Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan Perangkat Daerah		Opini Laporan Keuangan Pemda	Perbandingan opini BPK tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
4.		Meningkatnya kualitas LKjIP Pemda dan Perangkat Daerah	1	Meningkatnya nilai hasil evaluasi LKjIP Inspektorat Daerah	Jumlah PD yang memiliki nilai evaluasi sangat baik	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
			2	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu LKjIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	Rasio perolehan nilai evaluasi LKjIP PD tahun berjalan dan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
5.		Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan		Persentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	Jumlah temuan tahun berjalan yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
6.		Meningkatnya jumlah obrik		Persentase peningkatan obrik	Jumlah obrik tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
7.		Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1	Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat	Jumlah SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			2	Jumlah SDM bersertifikat auditor	Jumlah SDM bersertifikat auditor tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya		
8		Meningkatnya kinerja pengawas	1.	Level KPA	Nilai/Indek Level KPA	Irbawil I/II/III/IV	Inspektorat Daerah
			2.	Level maturitas SPIP	Nilai/Indek Level KPA		
Disdikbud							
1.		Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	BPS	Disdikbud
			2	Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak		

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
				pada umur tertentu di masa mendatang			
			3	Angka partisipasi kasar Pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta didik PAUD dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun x 100%	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud
			4	Prosentase satuan Pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah seluruh satuan PAUD x 100%	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud
			5	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai Gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebeleur dalam kondisi yang baik	Jumlah TK Negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai Gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebeleur dalam kondisi yang baik dibagi Jumlah Seluruh TK Negeri x 100%	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud
			6	Persentase jumlah satuan Pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program Pendidikan karakter secara berkelanjutan	Jumlah satuan Pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program Pendidikan karakter secara berkelanjutan dibagi	Bidang PAUD dan PNF	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah seluruh satuan PAUD x 100%		
			7 Angka partisipasi kasar SD/ sederajat	Jumlah peserta didik dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%	Bidang SD	Disdikbud
			8 Angka partisipasi murni SD/ sederajat	Jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%	Bidang SD	Disdikbud
			9 Rata-rata nilai ujian SD/ sederajat	Rata-Rata Hasil Ujian SD	Bidang SD	Disdikbud
			10 Angka partisipasi kasar SMP/ sederajat	Jumlah peserta didik dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			11 Angka partisipasi murni SMP/ sederajat	Jumlah peserta didik SMP usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			12 Rata-rata nilai ujian SMP/ sederajat	Rata-Rata Hasil Ujian SMP	Bidang SMP	Disdikbud
			13 Angka melanjutkan dari SD ke SMP	Jumlah Siswa Baru yang diterima di SMP/Sederajat dibagi Jumlah Siswa Lulusan SD/Sederajat x 100%	Bidang SD	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			14	Persentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik	Jumlah SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik dibagi Jumlah Seluruh SD Negeri x 100%	Bidang SD	Disdikbud
			15	Persentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik	Jumlah SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebeleur) dalam kondisi baik dibagi Jumlah Seluruh SMP Negeri x 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			16	Persentase sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	Jumlah satuan PAUD, SD dan SMP yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan dibagi jumlah seluruh satuan PAUD, SD dan SMP x 100%	Bidang PAUD dan PNF, Bidang SD dan Bidang SMP	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			17	Angka putus sekolah SD	Jumlah siswa putus sekolah SD dibagi jumlah seluruh siswa SD pada tahun tertentu x 100%	Bidang SD	Disdikbud
			18	Angka putus sekolah SMP	Jumlah siswa putus sekolah SMP dibagi jumlah seluruh siswa SMP pada tahun tertentu x 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			19	Angka lulusan SD	Jumlah siswa lulus SD dibagi jumlah siswa tingkat terakhir SD x 100%	Bidang SD	Disdikbud
			20	Angka lulusan SMP	Jumlah siswa lulus SMP dibagi jumlah siswa tingkat terakhir SMP x 100%	Bidang SMP	Disdikbud
			21	Angka melek huruf penduduk usia produktif	Jumlah penduduk usia 18-60 tahun yang melek aksara dibagi jumlah penduduk usia 18-60 x 100%	Bidang PAUD dan PNF,	Disdikbud
			22	Persentase program atau satuan Pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	Jumlah program atau satuan Pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah	Bidang PAUD dan PNF,	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
					seluruh program atau satuan PNF x 100%		
2.		Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsive dan partisipatif	1	Persentase guru berkualifikasi ijazah S1/D4	Jumlah guru berkualifikasi minimal S1/D4 dibagi jumlah seluruh guru x 100%	Bidang Ketenagaan	Disdikbud
			2	Persentase guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	Jumlah guru yang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dibagi jumlah guru x 100%	Bidang Ketenagaan	Disdikbud
			3	Rata-rata hasil uji kompetensi guru	Nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru yang diselenggarakan Kemendikbud	Bidang Ketenagaan	Disdikbud
3.		Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan Bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan local	1	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
			2	Jumlah grup kesenian yang dibina	Jumlah grup kesenian yang dibina	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
			3	Jumlah benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan	Disdikbud

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
4.		Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan Pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pendidikan dan kebudayaan	Nilai hasil survey kepuasan	Sekretariat	Disdikbud
	Satpol PP					
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat	Satpol PP
2.		Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat	Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Bidang Penegakan Perda, Bidang Perlindungan Masyarakat	Satpol PP

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3		Meningkatnya penanggulangan bencana kebakaran	Persentase penurunan kerugian akibat bencana kebakaran	Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran dikali 100	Bidang Pemadam Kebakaran	Satpol PP
	DP3AP2KB					
1.		Terakomodasi kepentingan perempuan dan anak	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Nilai SAKIP DP3AP2KB hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	DP3AP2KB
			2 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah pekerja perempuan	Disnaker BPS	DP3AP2KB
			3 Partisipasi perempuan di Lembaga swasta	Pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan	Disnaker BPS	DP3AP2KB
			4 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Pekerja anak usia 5-14 tahun dibagi Jumlah	Disnaker BPS	DP3AP2KB

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				pekerja usia 5 tahun keatas		
			5	Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja perempuan	BPS	DP3AP2KB
			6	Kecamatan ramah anak Jumlah Kecamatan yang sudah ramah anak dibagi jumlah Kecamatan	Bidang PPPA	DP3AP2KB
			7	Persentase perempuan di Lembaga legislative Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dibagi Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Setwan	DP3AP2KB
2.		Peserta KB aktif dan peserta KB baru	1	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif Jumlah peseta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
			2	Rata-rata jumlah anak perkeluarga Jumlah anak dibagi jumlah keluarga	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
3.		Menurunnya PUS yang ber-KB tidak terlayani		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (Unmet need) Jumlah PUS yang ingin ber -KB tidak terlayani dibagi jumlah PUS	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
4.		Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKB		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Jumlah anggota BKB yang ber -KB dibagi jumlah anggota BKB	Bidang Dalduk	DP3AP2KB

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
5.		Semakin bertambah anggota kelompok UPPKS menjadi peserta KB	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber - KB dibagi jumlah PUS anggota UPPKS	Bidang Dalduk	DP3AP2KB
Dinas Pangan dan Pertanian						
1.		Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi produk pertanian tahun N dibandingkan dengan tahun N-1 dikalikan 100%	Bidang Ketahanan Pangan	Dispaperta
2		Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama	1 Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)		Bidang Ketahanan Pangan	Dispaperta
			a. beras	Produksi gabah kering panen dikurangi angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendeman beras 62,74%		
			b. jagung	Produksi jagung dikurangi angka susut atau dikalikan dengan angka konversi jagung 89%		

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			2	Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Jumlah cadangan pangan kabupaten di bagi standar cadangan pangan kabupaten dikali 100%	Bidang Ketahanan Pangan	Dispaperta
3.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dispaperta		Nilai SAKIP Dispaperta	Nilai SAKIP Dispaperta	Sekretariat	Dispaperta
Dinas Lingkungan Hidup							
1.		Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		Jumlah pelaku usaha/perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	Jumlah pelaku usaha / perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2.		Terwujudnya air sungai yang bersih tidak tercemar		Jumlah sungai	Jumlah pengambilan uji sampel air dibagi jumlah sungai	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3.		Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau	Jumlah kawasan lindung dibagi jumlah ruang terbuka hijau	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4.		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	Jumlah penduduk per 1.000 dibagi jumlah bank sampah dikalikan 100%	Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
Disparpora						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Disparpora	Nilai SAKIP Disparpora	Nilai SAKIP Disparpora hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disparpora
2.		Meningkatnya jumlah pengunjung destinasi wisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun N – jumlah wisatawan tahun N-1 dibagi jumlah wisatawan tahun N-1 dikali 100%	Bidang Pemasaran Pariwisata	Disparpora

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3.		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N dikurangi jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N-1 dibagi jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N-1 kali 100%	Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata	Disparpora
4.		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	Disparpora
DPMPTSP						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	<i>DPMPTSP</i>
2.		Meningkatnya jumlah investasi PMA, PMDN, dan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Jumlah investasi tahun N - jumlah tahun N-1 di Kab.Batang dibagi jumlah investasi tahun N-1 di Kab.Batang dikali 100%	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	Disnaker						
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Ketenagakerjaan		Nilai SAKIP Disnaker	Nilai SAKIP DPMPTSP hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disnaker
2		Meluasnya kesempatan kerja bagi masyarakat	1	Tingkat kesempatan kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	Bidang Lapentatrans	Disnaker
			2	Persentase pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan dibagi jumlah pencari kerja dikali 100%		
3		Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja		Rasio ketergantungan	Jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dibagi dengan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) dikalikan 100%	Bidang Lapentatrans	Disnaker

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
4		Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	Bidang Hubungan Industrial	Disnaker	
5		Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan meningkatnya kemandirian transmigran	Persentase penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yang berhasil ditempatkan setelah mendapat pelatihan dibagi jumlah transmigran dikali 100%	Bidang Lapentatrans	Disnaker	
Dinas Kesehatan							
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinkes	Nilai SAKIP Dinkes	Nilai SAKIP Dinkes	Sekretariat	Dinas Kesehatan	
2.		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan status gizi masyarakat	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin, nifas dalam satu tahun dibagi jumlah kelahian hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan
			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian anak usia kurang dari 1 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			3	Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA)	Jumlah kematian anak usia kurang dari 5 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan
			4	Angka Kesembuhan Pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA) Positif (<i>Cure Rate/CR</i>)	Jumlah Penderita TB BTA yang sembuh dibagi jumlah penderita TB BTA ditambah yang diobati dibagi 100	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
			5	Angka Prevelensi Penyakit Kusta	Jumlah Kasus Baru Kusta yang ditemukan dibagi Jumlah Penduduk Pada Tahun yang sama dikali 100.000		
			6	Angka Kesakitan Malaria (<i>Annual Parasite Incidence/API</i>)	Jumlah penderita malaria positif yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama kali 1.000		
			7	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (<i>Incidence Rate/IR DBD</i>)	Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue yang Ditemukan Dibagi Jumlah Penduduk Pada Tahun yang Sama Kali 100.000		

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			8	Angka Prevelensi Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus Gizi Buruk yang Ditemukan (Berat Badan/Tinggi Badan) dibagi Jumlah Balita yang Ada Kali 100)		
			9	Angka Prevelensi Stunting	Jumlah Kasus Balita Stunting Dibagi Jumlah Balita Yang Ada Kali 100		
	DPUPR						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPUPR		Nilai SAKIP DPUPR	Nilai SAKIP DPUPR hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	DPU PR
2.		Meningkatnya konektivitas jalan dan jembatan di daerah		Cakupan konektivitas wilayah	Panjang jalan daerah (Kabupaten) yang mendukung kawasan prioritas yang dibangun/direhab dibagi total Panjang jalan daerah yang mendukung Kawasan prioritas dikali 100%	Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan	DPU PR

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3.		Menngkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air irigasi	Persetase luas sawah yang beririgasi	Luas sawah yang dialiri irigasi dibagi luas areal sawah kabupaten dikalikan 100%	Bidang Pengairan	DPU PR
4.		Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	Jumlah Gedung negara dibagi jumlah kebutuhan bangunan Gedung negara dikali 100%	Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan	DPUPR
5.		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata ruang yang berwawasan lingkungan	1. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah per HPL/HGB kali 100%	Bidang Penataan Ruang	DPUPR
			2. Luas RTH Publik 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibagi luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan kali 100%		DPUPR
DPRKP						
1		Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas DPRKP	Nilai SAKIP DPRKP	Nilai SAKIP DPRKP hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	DPRKP

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
2		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan pemukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan	1.	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman yang layak	Jumlah infrastruktur yang dipenuhi dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	Bidang Pemukiman	DPRKP
			2.	Persentase pengurangan pemukiman kumuh	Jumlah luas lingkungan kumuh yang tertangani dibagi luas lingkungan kumuh kali 100%	Bidang Pemukiman	DPRKP
3		Meningkatnya penyelesaian permasalahan pertanahan		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%	Bidang Perumahan dan Pertanahan	DPRKP
Disdukcapil							
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Disdukcapil		Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai SAKIP Disdukcapil hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disdukcapil
2.		Meningkatnya penduduk yang memiliki data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap		Persentase kepemilikan identitas penduduk dan akte kelahiran	Jumlah KIA ditambah jumlah penduduk berKTPelektronik dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun kali 100%	Bidang Capil	Disdukcapil

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3.		Meningkatnya kualitas database dan informasi kependudukan yang valid dan update	Persentase data kependudukan yang valid	Jumlah data kependudukan yang terverifikasi valid dikurangi jumlah seluruh data kependudukan kali 100%	Bidang PIAK	Disdukcapil
Diskominfo						
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat	Diskominfo
2.		Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berbasis Smart City	1 Indeks SPBE	Perhitungan Indeks SPBE dilakukan oleh Kemenpan RB setiap satu tahun sekali melalui evaluasi sesuai dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2018 tentang SPBE	Kementrian Kominfo	Diskominfo
			2 Indeks Smart City	Perhitungan Indeks Smart City dilakukan oleh Kementerian Kominfo setiap satu tahun sekali melalui evaluasi	Kementrian Kominfo	Diskominfo

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3		Meningkatnya pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik	Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik	Perhitungan tingkat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik dilakukan oleh komisi informasi Provinsi Jateng setiap satu tahun sekali melalui evaluasi	Hasil Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Diskominfo
4		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dan penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan dan statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengguna data statistik sektoral dibagi jumlah Perangkat Daerah sebagai produsen data kali 100%	Sistem informasi statistic sektoral dan Perangkat Daerah Produsen Data	Diskominfo
5		Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan sistem elektronik	Indeks Keamanan Informasi	Perhitungan indeks keamanan informasi dapat dilakukan oleh BSSH atau melalui evaluasi internal sesuai dengan indeks keamanan informasi setiap satu tahun sekali	Laporan/ Audit Internal	Diskominfo

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	Dislutkanak						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dislutkanak		Nilai SAKIP Dislutkanak	Nilai SAKIP Dislutkanak hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Dislutkanak
2.		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap dalam satu tahun	Bidang Usaha dan Pengelolaan TPI	Dislutkanak
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	2	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya satu tahun	Bidang Perikanan Budidaya	Dislutkanak
		Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Batang	3	Tingkat konsumsi makan ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi/ setara konsumsi ikan utuh segar	Bidang Usaha dan Pengelolaan TPI	Dislutkanak
3.		Meningkatnya populasi hewan ternak		Jumlah populasi hewan ternak	Jumlah populasi hewan ternak dalam satu tahun	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dislutkanak

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
4.		Meningkatnya produksi ternak	Jumlah produksi ternak (produksi daging, telur dan susu)	Jumlah produksi daging (Kg), telur (Kg) dan Susu (Kg)	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dislutkanak
Dinas Sosial						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Nilai SAKIP Dinsos dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Dinas Sosial
2.		Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	1 Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga dibagi Jumlah PMKS X 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			2 Persentase PMKS yang menerima manfaat program penanganan bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PMKS penerima program penanganan bencana dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima program penanganan bencana kali 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			3	Persentase warga negara migran yang dipulangkan yang menerima fasilitasi kepulangannya	Jumlah warga negara migran penerima program penanganan dibagi jumlah warga negara migran yang seharusnya menerima program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan kali 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			4	Persentase PMKS penerima manfaat program rehabilitasi sosial	Jumlah PMKS yang menerima program rehabilitasi social dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima program rehabilitasi sosial kali 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			5	Persentase PMKS penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah PMKS penerima program perlindungan dan jaminan social dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima program perlindungan dan jaminan sosial kali 100	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
3.		Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PSKS yang aktif dalam pembangunan kesejahteraan social	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos dibagi Jumlah PSKS X 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			2	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah PSKS yang aktif kali 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
			3	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara dibagi jumlah taman makam pahlawan kali 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
Bapelitbang							
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perencanaan dan Litbang Daerah		Nilai SAKIP Bapelitbang	Nilai SAKIP Bapelitbang hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Bapelitbang
2.		Terwujudnya perencanaan yang holistik, tematik dan terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah	1	Persentase sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Jumlah sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD kali 100	Bidang PPEPD	Bapelitbang
			2.	Nilai penghargaan pembangunan daerah	Hasil penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah	Bidang PPEPD	Bapelitbang

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Kabupaten Batang pada tahun berkenaan		
3		Meningkatnya efektivitas pembangunan daerah berbasis hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Hasil kelitbangan yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang telah dilaksanakan dikali 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang
			2. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang
BPKPAD						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	BPKPAD
2.		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkualitas	1. Terlaksananya penerapan administrasi keuangan berbasis IT	Jumlah OPD yang menerapkan administrasi berbasis IT / Jumlah seluruh OPD di Kabupaten Batang dikali 100	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	BPKPAD
			2. Tersusunnya Perda APBD, Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran	Jumlah Perda APBD, Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran yang tersusun Tepat	Bidang Anggaran dan	BPKPAD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
				Waktu/Tidak Tepat Waktu	Dana Perimbangan		
			3	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	Jumlah Perda APBD, Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran yang tersusun Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan	BPKPAD
3.		Meningkatnya jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase penyelesaian masalah Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Jumlah masalah PBB terselesaikan/Jumlah seluruh masalah PBB dikali 100	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP	BPKPAD
			2	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi yang ada	PAD tahun N dikurangi PAD tahun N-1 dibagi PAD tahun N-1 dikalikan 100%	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP	BPKPAD
4.		Tersusunnya Data Aset Pemerintah Daerah yang Valid		Terdokumentasinya Aset Pemerintah Daerah Batang Menurut Persebaran, Ststus dan Kepemilikan Serta Kondisinya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilaporkan	Bidang Aset Daerah	BPKPAD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
BKD						
1.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas BKD	Nilai SAKIP BKD	Nilai SAKIP BKD hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	BKD
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai rata-rata survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Sekretariat	BKD
3		Terwujudnya ASN yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase ASN dengan nilai kerja kriteria "baik" dan "sangat baik"	Jumlah ASN Kabupaten Batang yang memiliki kinerja "baik" dan "sangat baik" dibagi jumlah ASN Kabupaten Batang kali 100	Bidang Binkes	BKD
Kesbangpol						
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbang	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Badan Kesbangpol
2		Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib	Persentase demo tertangani	Jumlah demo tahun berkenaan dibagi jumlah demo tahun sebelumnya dikali 100	Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Bidang	Badan Kesbangpol

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
					Poldagri dan Ormas	
3		Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	Persentase potensi gangguan/ konflik sosial keagamaan yang teratasi	Jumlah konflik social tahun berkenaan dibagi jumlah konflik sosial tahun sebelumnya dikali 100	Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sosial	Badan Kesbangpol
	BPBD					
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Nilai SAKIP BPBD hasil evaluasi Inspektorat	Sekretariat	BPBD
2		Tertanganinya Daerah Rawan Bencana secara efektif dan efisien	Persentase penurunan daerah rawan bencana	Jumlah desa dan kelurahan rawan bencana di bagi jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Batang dikali 100%		BPBD
3		Meningkatnya fasilitasi kegiatan kajian resiko bencana di Kabupaten Batang	Persentase ketersediaan peta resiko bencana	Jumlah peta resiko bencana dibagi peta resiko di Kabupaten Batang dikali 100%		BPBD

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
Dispermades							
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dispermades		Nilai SAKIP Dispermades	Nilai SAKIP Dispermades hasil evaluasi Inspektorat	Sekretariat	Dispermades
2		Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan sosial ekonomi dan ekologi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Sosial	Hasil penilaian dari variabel pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman	Bidang Pemberdayaan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dispermades
			2	Indeks Ketahanan Ekonomi	Hasil penilaian dari variabel keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar akses logistik, akses perbankan dan kredit keterbukaan wilayah		Dispermades
			3	Indeks Ketahanan Ekologi	Hasil penilaian dari variable kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana		Dispermades
3		Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat		Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Jumlah sumbangan pendapatan dari perempuan dibagi jumlah pendapatan dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dispermades

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
Disperindagkop dan UKM						
1		Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Disperindagkop dan UKM	Nilai SAKIP Disperindagkop dan UKM	Nilai SAKIP Disperindagkop dan UKM hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disperindagkop dan UKM
2		Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas koperasi di Kabupaten Batang	Pertumbuhan Koperasi Sehat	(Jumlah koperasi sehat tahun n - jumlah koperasi sehat tahun n-1) dibagi jumlah koperasi sehat tahun n-1) kali 100	Bidang Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
3		Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah produk UMKM yang mampu berdaya saing di pasar domestic maupun manca negara	Jumlah produk UMKM yang mampu berdaya saing di pasar domestic maupun manca negara	Bidang Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
4		Meningkatkan pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	(Jumlah IKM tahun n - jumlah IKM tahun n-1) dibagi jumlah IKM tahun n-1 kali 100	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Disperindagkop dan UKM
5		Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan peredaran barang/jasa dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor - nilai impor	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Disperindagkop dan UKM

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Dishub					
1		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dishub	Nilai SAKIP Dishub	Nilai SAKIP Dishub hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat	Dishub
2		Meningkatnya layanan mobilitas dan kapasitas sarana prasarana transportasi	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	Bidang Angkutan	Dishub
3		Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	Persentase penurunan angka kecelakaan	Jumlah kecelakaan tahun sekarang dikurangi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dibagi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dikalikan 100%	Bidang KTS	Dishub

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
	Disperpuska						
1		Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Disperpuska hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	Disperpuska
			2	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tingkat kematangan organisasi Disperpuska	Sekretariat	Disperpuska
			3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKM Disperpuska hasil survey SKM pada Disperpuska	Sekretariat	Disperpuska
2		Meningkatnya minat membaca dan pembangunan literasi masyarakat	1	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	$TGM = (0,3 \times (FM + DM + JB)) + 0,05 \times (FAI + DAI)$ <p>TGM = tingkat gemar membaca masyarakat FM = frekuensi membaca DM = durasi membaca JB = jumlah bacaan FAI = frekuensi akses internet</p>	Bidang Perpustakaan	Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
				DAI = durasi akses internet			
			2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$IPLM = \sum \frac{UPLM}{AM}$ <p> Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) </p>	Bidang Perpustakaan	Disperpuska
3		Terpeliharanya dokumen arsip daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1	Tingkat ketersediaan arsip	$= \frac{a + i + s + j}{4}$ <p> T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip </p>	Bidang Kearsipan	Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				<p>s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p>j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>		
			2	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip</p> $T = \frac{m + b + g + a + c + i}{6}$ <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan</p>	Bidang Kearsipan	Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
	Kecamatan					
1.		Meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat di wilayah kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan	Sekretariat Kecamatan
2.		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintah kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah	Sekretariat Kecamatan

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3.		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam wilayah kecamatan	Data Rumah Tangga Miskin (RTM) per kecamatan dari Dinas Sosial	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan
4.		Terwujudnya kondusivitas wilayah kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	Jumlah kasus kriminal dibagi jumlah penduduk kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI